

**USULAN**  
**PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**STANDARISASI BENTUK BADAN USAHA PENYELENGGARA SARANA  
PERKERETAAPIAN UMUM**

**Oleh:**

**Dr. LeliJoko Suryono, S.H., M.Hum./NIDN 0523106801 /Ketua Tim**  
**Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H./NIDN 0515047501/Anggota Tim**  
**Reni Anggriani, S.H., M.Kn./NIDN 0501127502 /AnggotaTim**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**JULI 2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

Judul Penelitian : Standarisasi Bentuk Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum  
Bidang Fokus : Transportasi  
Kode>Nama Rumpun Ilmu : 613/Humaniora  
Bidang Unggulan PT : Hukum dan Ekonomi Syariah  
Topik Unggulan : Model regulasi kebijakan  
Ketua Peneliti  
a. Nama Lengkap : Dr LELI JOKO SURYONO S.H., M.Hum  
b. NIDN : 0523106801  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Nomor HP/Surel : +6281392415868/lelijokosuryo@yahoo.com  
Anggota Peneliti (1)  
a. Nama Lengkap : NANIK PRASETYONINGSIH  
b. NIDN : 0515047501  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Anggota Peneliti (2)  
a. Nama Lengkap : RENI ANGGRIANI S.H., M.Kn.  
b. NIDN : 0501127502  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lama Penelitian Keseluruhan : 2 tahun  
Usulan Penelitian Tahun ke- : 1  
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 124,680,000.00  
Biaya Penelitian  
- diusulkan ke DRPM : Rp 124,680,000.00  
- dana internal PT : Rp 0.00  
- dana institusi lain : Rp 0.00 /in kind tuliskan: 0  
Biaya Luaran Tambahan : Rp 0.00

D.I. YOGYAKARTA, 05-07-2017

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.)  
NIP/NIK 19710409199702153028

Ketua Peneliti

(Dr LELI JOKO SURYONO S.H., M.Hum)  
NIP/NIK

Menyetujui,  
Ketua DRPM UMY



(Dr. Gato Supangkat, M.P.)  
NIP/NIK 196210231991031003

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Standar Minimal Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum

2. Tim Pelaksana

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. LeliJoko Suryono, S.H., M.Hum.	Ketua	Perdata	FH UMY	15
2	Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.	Anggota	Tata Negara	FH UMY	15
3	Reni Anggriani, S.H., M.Kn.	Anggota	Perdata	FH UMY	15

3. Objek Penelitian : Badan Usaha Perkeretaapian

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Agustus 2017

Berakhir : Juli 2018

5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang

a. Tahun ke-1 : Rp 124.680.000,00

6. Lokasi Penelitian : Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Republik Indonesia

7. Instansi lain yang terlibat Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Republik Indonesia, sebagai instansi yang akan menentukan badan usaha yang seperti apa yang harus dipenuhi untuk menjadi badan usaha perkeretaapian.

8. Temuan yang ditargetkan :

No	Permasalahan yang ditemukan	Solusi yang ditawarkan
1	Belum adanya standar minimal untuk menjadi Badan Usaha Perkeretaapian	Adanya standar minimal untuk menjadi Badan Usaha Perkeretaapian
2	Belum adanya kepastian hukum terhadap syarat minimal untuk menjadi badan usaha perkeretaapian	Adanya kepastian hukum terhadap syarat minimal dalam pembentukan badan usaha perkeretaapian.

9. Kontribusi mendasar pada bidang ilmu :

Standar minimal badan usaha perkeretaapian merupakan hal yang sangat penting dan mendasar yang harus diketahui oleh suatu badan usaha yang akan menginvestasikan dananya di bidang perkeretaapian, sehingga badan usaha dapat mengukur kemampuannya untuk menjadi badan usaha perkeretaapian. Diharapkan dengan adanya Standar minimal maka hanya badan usaha yang benar-benar mampu yang akan menjadi badan usaha perkeretaapian.

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk memuat hasil penelitian ini dalam Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk tahun 2018.
11. Rencana luarannya adalah diterbitkannya buku mengenai badan usaha perkeretaaapian pada tahun 2019.

**Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan**

No	Jenis				Indikator Capaian		
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS <sup>1)</sup>	TS+1	TS+2
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal <sup>2)</sup>	Internasional bereputasi					
		Nasional Terakreditasi					
		Nasional tidak terakreditasi					
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding <sup>3)</sup>	Internasional Terindeks					
		Nasional					
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah <sup>4)</sup>	Internasional					
		Nasional					
4	<i>Visiting Lecturer</i> <sup>5)</sup>	Internasional					
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) <sup>6)</sup>	Paten					
		Paten sederhana					
		Hak Cipta					
		Merek dagang					
		Rahasia dagang					
		Desain Produk Industri					
		Indikasi Geografis					
		Perlindungan Varietas					
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu					
6	Teknologi Tepat Guna <sup>7)</sup>						
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial <sup>8)</sup>						
8	Buku Ajar (ISBN) <sup>9)</sup>						
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) <sup>10)</sup>						

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Halaman Pengesahan	2
Identitas dan Uraian Umum	3
Daftar Isi	5
Ringkasan	6
Bab 1. Pendahuluan	7
Bab 2. Renstra dan Peta Jalan Perguruan Tinggi	8
Bab 3. Tinjauan Pustaka	13
Bab 4. Metode Penelitian	14
Bab 5. Biaya dan Jadwal Penelitian	17
Daftar Pustaka	19
Lampiran-Lampiran	
Lampiran 1. Biodata Ketua dan anggota tim	20
Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketua Peneliti	36

## RINGKASAN

Landasan penelitian ini adalah bahwa belum adanya standar minimal untuk membuat badan usaha untuk kegiatan perkeretaapian, tetapi di sisi lain kereta api adalah merupakan moda transportasi massal yang sangat diminati oleh masyarakat di negara tercinta Indonesia ini. Kereta api adalah moda yang dapat menghubungkan antar wilayah dan propinsi dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan angkutan darat lainnya.

Dalam kenyataannya badan usaha perkeretaapian masih dimonopoli oleh PT KAI, yang berakibat tidak ada tolak ukur untuk peningkatan layanan sebagaimana moda angkutan darat atau udara yang tidak hanya dimonopoli oleh satu badan usaha.

Untuk peningkatan pelayanan tersebut pemerintah perlu untuk membuat suatu syarat minimal kelayakan suatu badan usaha perkeretaapian dengan tujuan ke depan tidak hanya dimonopoli oleh PT KAI.

Penelitian ini sangat penting untuk menentukan syarat minimal mengajukan badan usaha perkeretaapian, sehingga apabila ada tolak ukur atau kepastian hukum bagi badan usaha yang akan bergerak di bidang perkeretaapian.

Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai badan usaha perkeretaapian tetapi secara teknis belum ada pelaksanaannya.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran atas syarat minimal untuk membuat badan usaha perkeretaapian.

Permasalahan yang ditemukan adalah apakah syarat minimal untuk dapat membuat badan usaha perkeretaapian.

Tujuannya adalah bahwa adanya tolakukur atau syarat minimal di dalam membuat badan usaha perkeretaapian. Indikator luaran yang akan dicapai adalah adanya peraturan yang dikeluarkan oleh instansi terkait dalam hal ini dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian, mengenai syarat minimal dari badan usaha perkeretaapian. Rencana target adalah menghasilkan publikasi jurnal nasional terakreditasi.

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

Perkeretaapian sebagai salah satu alat transportasi nasional, memiliki karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri. Moda transportasi kereta api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Transportasi kereta api perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk dapat mengakhiri era monopoli penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia, maka Pemerintah mendorong kontribusi Pemerintah Daerah dan Swasta untuk terlibat dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Kedepan terdapat badan usaha yang berperan serta dibidang perkeretaapian. Pemerintah sebagai regulator akan menseleksi dan mengevaluasi badan usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Dalam perjalanan penyelenggaraan perkeretaapian bersifat monopoli alamiah. Monopoli alamiah ini didasarkan pertimbangan atas masifnya kebutuhan pendanaan bagi penyelenggara perkeretaapian. Implikasinya, tidak banyak badan usaha tertarik dan berminat untuk menjadi penyelenggara perkeretaapian di Indonesia. Masih terbatasnya badan usaha baru yang berperan serta dalam penyelenggaraan perkeretaapian pasca delapan tahun legislasi Undang-Undang Perkeretaapian menjadi urgensi bagi upaya untuk mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah dan Swasta.

Namun, penyelenggaraan perkeretaapian membutuhkan pendanaan yang masif dan syarat lainnya yang berbeda dalam pembentukan badan usaha pada umumnya, sehingga prinsip kehati-hatian diperlukan untuk menetapkan badan usaha penyelenggara perkeretaapian. Perizinan dapat menjadi instrumen bagi pemerintah untuk menjalankan pembinaan dan pengendalian badan usaha penyelenggara perkeretaapian. Perizinan ini dapat menjadi mekanisme pengujian kesesuaian dan kepastan atau *fit and proper* bagi badan usaha untuk menyelenggarakan

prasarana dan/atau sarana perkeretaapian umum maupun menyelenggarakan perkeretaapian khusus.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penentuan persyaratan bagi badan usaha penyelenggara perkeretaapian memiliki manfaat berikut. Wujud tanggung jawab Pemerintah untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian agar setiap badan usaha memahami risiko bisnis sebagai penyelenggara perkeretaapian. Hal tersebut di atas menjadi urgensi bagi perlunya kajian untuk merumuskan persyaratan badan usaha penyelenggara perkeretaapian umum .

## **BAB 2. RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI**

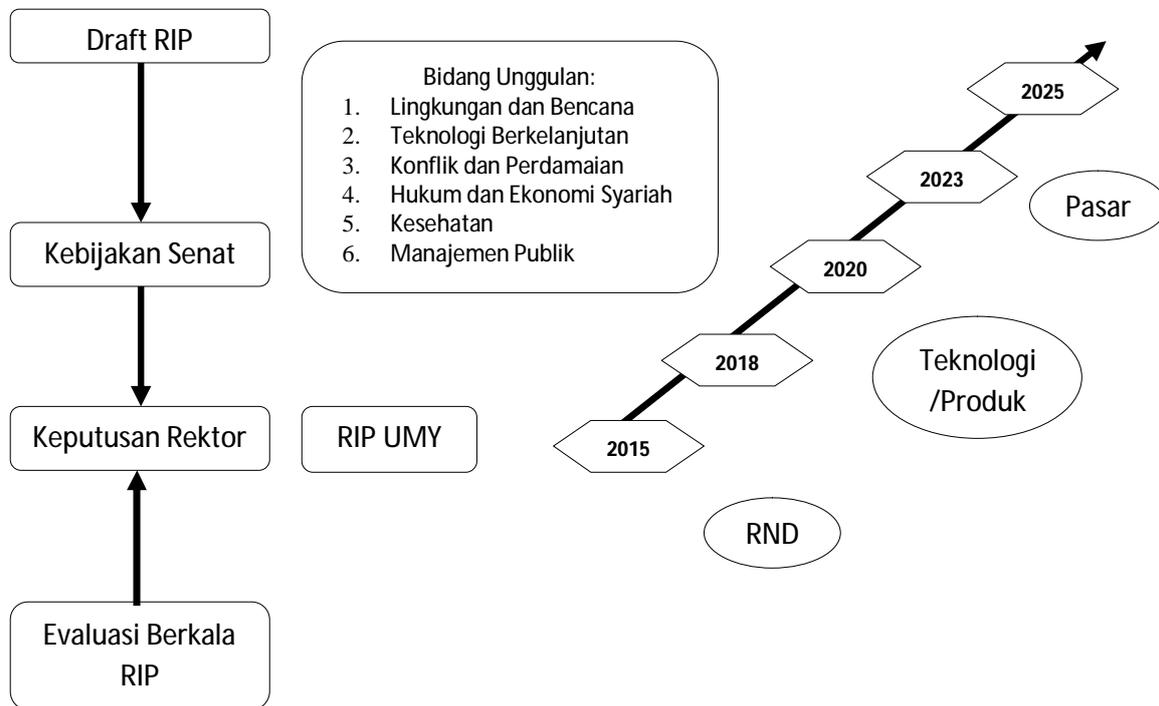
Rencana Induk Penelitian Strategis dan Pengabdian Masyarakat (RIPSPM) UMY merupakan terjemahan visi dan misi UMY ada tingkat kebijakan strategis dan operasional di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Tujuan dari RIPSPM adalah memberikan panduan umum bagi seluruh sivitas akademika UMY di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat agar mendapatkan hasil yang berkualitas dan memiliki dampak yang kuat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun masyarakat yang berbudaya luhur dan berkahlaqul karimah, memperkuat masyarakat sipil, mendukung proses demokratisasi, serta mencerdaskan kehidupan kebangsaan.

RIPSPM UMY disusun selaras dengan program pembangunan nasional, khususnya yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia 2005-2024 maupun agenda MDGs (Millenium Development Goals). Oleh karena itu, LP3M UMY sebagai unit kerja yang secara khusus menangani bidang penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah-masalah pokok agenda masyarakat dunia saat ini, termasuk masalah keamanan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup, sumber daya alam, pendidikan, dan kelompok marginal. Untuk itu, spirit yang terangkum dalam RIPSPM adalah untuk meningkatkan pencapaian manusia Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi; mempromosikan perdamaian, demokrasi, kesetaraan gender dan keadilan sosial; mendorong terwujudnya kedaulatan bangsa di bidang budaya, sosial, ekonomi dan politik; serta membangun masyarakat Indonesia yang berkeadilan dan berkeadilan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

RIPSPM hadir untuk merespons tantangan dan kebutuhan masyarakat global. Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis, berada diantara dua samudra dan dua benua. Di bidang ekonomi, Indonesia merupakan pasar potensial bagi pelaku perdagangan dunia. Keunikan dan keragaman budaya di Indonesia bahkan menjadi daya tarik sendiri bagi bangsa-bangsa lain dari pelbagai belahan dunia, dan karena itu sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggul di beberapa wilayah di Indonesia. Di sisi yang lain, tantangan dari globalisasi juga semakin besar dan harus direspon secara sistematis dan komprehensif. Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang ditandai dengan semakin kompetitifnya produksi dan perdagangan di kawasan Asia, mengharuskan Negara Indonesia Republik Indonesia lebih siap dengan sumber daya manusia yang kompetitif, sistem produksi yang kuat, system persaingan yang sehat, ketersediaan infrastruktur yang mendukung baik di darat, udara maupun lautan, serta system birokrasi yang efisien dan akuntabel. Selain itu, konflik di tingkat global serta kesenjangan antara negara-negara besar dan negara-negara kecil, menjadi masalah tersendiri bagi keagamaan dunia. Dalam konteks inilah UMY merumuskan isu-isu strategis yang menjadi tema-tema penelitian dosen. Dengan mentasbihkan diri sebagai kampus yang Unggul dan Islami, UMY juga terus mencoba menggali, menafsirkan, mengkontekstualisasikan, dan mengimplementasikan universalitas nilai-nilai Agama Islam yang unggul dan mencerahkan yang selaras dengan semangat kemanusiaan untuk memberikan ruh bagi perkembangan ilmu dan teknologi serta demi terbangunnya bangsa Indonesia yang berkeadilan.

### Skema Rencana Induk Penelitian UMY



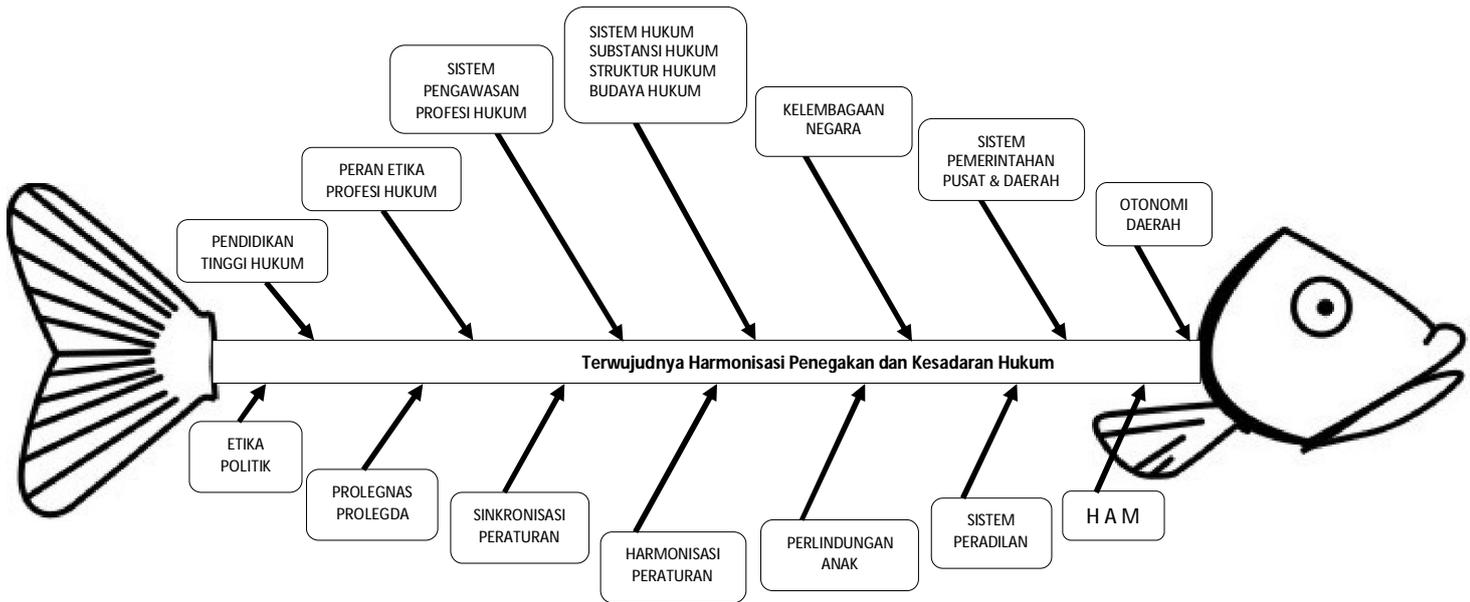
Peta-jalan (*roadmap*) penelitian Program Studi Ilmu Hukum UMY tahun 2014-2020 terdiri atas dua bagian, yakni tabel perumusan topik riset, dan *fishbone diagram* penelitian unggulan jurusan/prodi.

Tabel 1. Perumusan topik riset unggulan Program Studi Ilmu Hukum UMY

Isu strategis	Konsep pemikiran	Penyelesaian masalah	Topik riset yang diperlukan	Tahun <sup>1)</sup>
Penegakan Dan Kesadaran Hukum	1. Rendahnya integritas moral penegak hukum	1.1 Penguatan pendidikan tinggi hukum	1.1.1 Pendidikan tinggi hukum	
		1.2 Penguatan etika profesi penegak hukum	1.2.1 Peran etika profesi hukum 1.2.2 Sistem pengawasan profesi hukum	
	2. Banyaknya pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan	2.1 Penguatan sistem hukum	2.1.1 - sistem hukum - substansi hukum - struktur hukum - budaya hukum	
	3. Intervensi politik terhadap penegakan hukum	3.1 Penguatan sistem check and balances Lembaga negara 3.2. Peningkatan kesadaran etika politik	3.1.1 Kelembagaan negara 3.1.2 Sistem pemerintahan pusat dan daerah 3.1.3 Otonomi daerah 3.2.1 Etika politik	
4. Terjadinya tumpang	4.1. Peningkatan kualitas	4.1.1 prolegnas dan		

	tindih/ketidak sinkronan peraturan	prolegnas dan prolegda 4.2. Sinkronisasi peraturan perundangan	prolegda 4.2.1 sinkronisasi peraturan 4.2.2 harmonisasi peraturan	
	5. Penegakan sistem peradilan yang berkualitas	5.1 Adanya konsep restorative justice 5.2. Penguatan sistem peradilan 5.3. Penegakan hukum berperspektif HAM	5.1.1 perlindungan anak 5.2.1 sistem peradilan 5.3.1 hak-hak asasi manusia	

<sup>\*)</sup> Tidak harus urut tahun, kronologis pelaksanaan terlihat pada *fishbone diagram*.



Gambar 1. *Fishbone diagram* riset unggulan Prodi Ilmu Hukum UMY

### **BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA**

Moda transportasi kereta api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor tentang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Undang-undang Tentang Perkeretaapian maupun peraturan dibawahnya belum ada yang menjelaskan secara rinci mengenai syarat minimal untuk membuat badan usaha perkeretaapian. Dan dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2015 mengatur tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Bidang Usaha di Bidang Transportasi. Sesuai dengan dasar pertimbangannya, Permenhub Nomor 45 Tahun 2015 ini bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi, diperlukan pengaturan mengenai kewajiban kepemilikan modal badan usaha di bidang transportasi. Pasal 3 Permenhub Nomor 45 Tahun 2015 mengatur mengenai modal disetor yang mencakup ketentuan sebagai berikut: 1) Modal disetor merupakan modal minimal yang harus tersedia untuk kelangsungan usaha; dan 2) Modal disetor harus tercantum dalam neraca awal yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar.

Selama ini yang dapat menjadi penyelenggara dalam penyelenggaraan perkeretaapian adalah Badan Usaha, yang meliputi : a) BUMN; b) BUMD; dan c) Badan hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk badan usaha perkeretaapian. Pasal 1 UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pengertian BUMN adalah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :

#### 1. Perum

BUMN yang seluruh modalnya milik negara, modal tidak terbagi atas saham. Perum adalah seluruh modalnya adalah dari negara dan modalnya tidak terbagi menjadi saham-saham sehingga merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dibagi-bagi

## 2. Persero

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara dengan tujuan mencari keuntungan. BUMN yang berbentuk Persero, modalnya terbagi dari saham dan negara paling sedikit harus memiliki paling sedikit 51%, dengan tujuan untuk mencari keuntungan, sehingga saham lainnya boleh dimiliki oleh badan usaha lain ataupun perorangan.

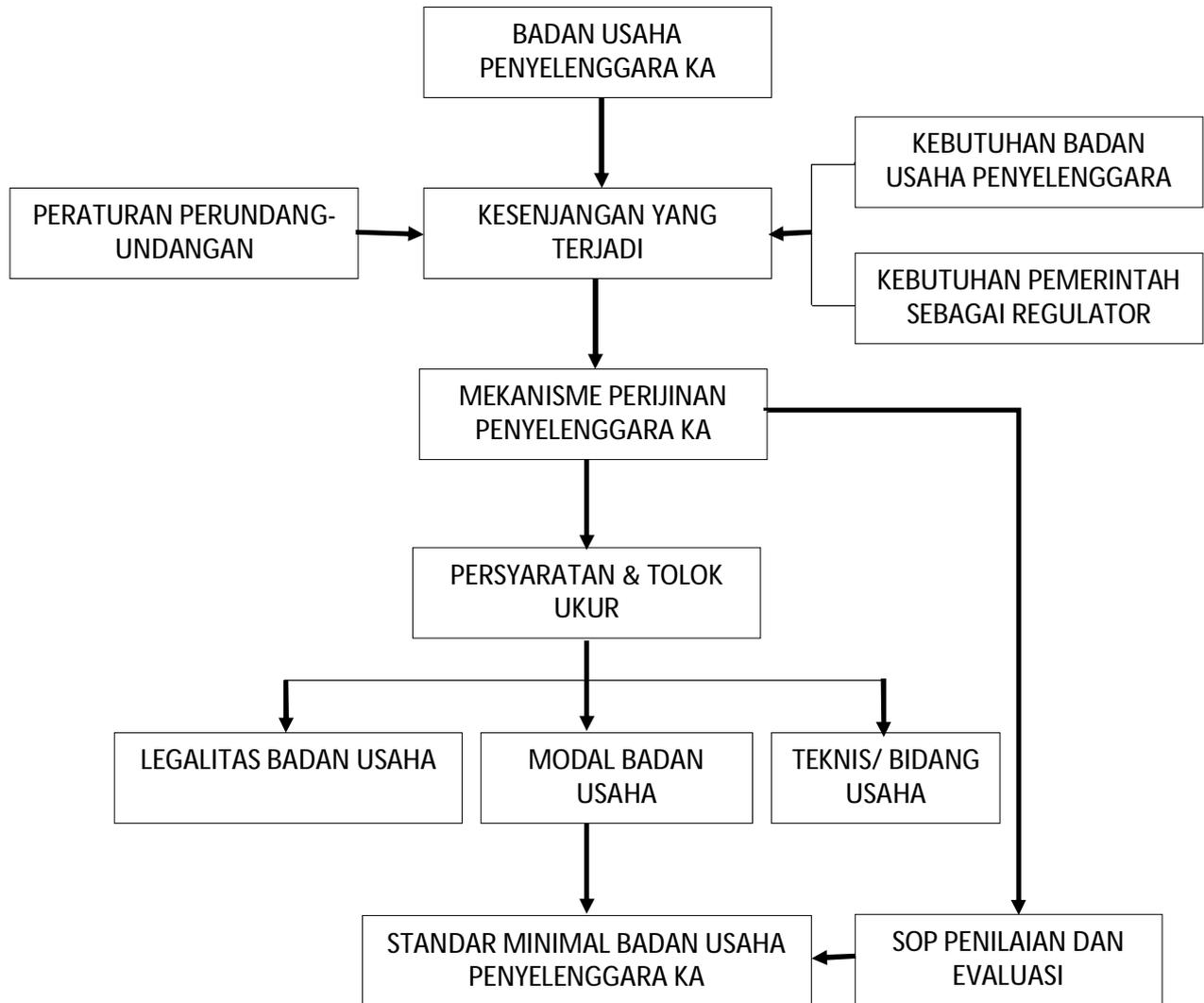
### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Fokus penelitian ini adalah persyaratan minimal sebuah badan usaha dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Penetapan standar minimal bagi badan usaha dalam penyelenggaraan perkeretaapian merupakan upaya untuk menentukan kualifikasi badan usaha yang akan melakukan usaha di bidang penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia. Peran badan usaha dalam bidang perkeretaapian sangat penting untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Penentuan standar minimal badan usaha dalam penyelenggaraan perkeretaapian ini sangat penting untuk digunakan dalam penyeleksi dan evaluasi badan usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum normative dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normative dilakukan untuk menelusuri dan mengkaji dasar-dasar pengaturan bidang perkeretaapian di Indonesia (*ius constitutum*). Selanjutnya hasil penelusuran akan digunakan untuk merumuskan pengaturan yang ideal (*ius constituendum*) untuk badan usaha yang dapat terlibat dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengamati dan melihat keterlibatan badan usaha dalam bidang perkeretaapian di Indonesia. Hal yang akan diamati antara lain: karakteristik penyelenggaraan perkeretaapian; struktur kelembagaan penyelenggaraan perkeretaapian; dan indikator penilaian persyaratan badan usaha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Alasan pemilihan metode penelitian ini adalah masalah penelitian ini tidak dapat dijawab hanya dengan satu metode, sehingga *mixed method approach* atau gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Creswell menjelaskan bahwa *mixed methods approach* menggunakan strategi penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara simultan atau berurutan untuk memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan pengumpulan informasi numerik dan teks, sehingga data akhir merupakan informasi kuantitatif dan kualitatif (Cresswell, 2002).

Kerangka Pemikiran Penelitian disajikan pada gambar 1 berikut.

**Gambar 1 1. Kerangka Pemikiran**

**Tabel 1. Proses Penelitian**

	<b>Permasalahan</b>		Belum adanya standar minimal untuk membuat badan usaha untuk kegiatan perkeretaapian	Belum adanya kepastian hukum terhadap syarat minimal untuk menjadi badan usaha perkeretaapian
<b>Tahun</b>				
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>Tahun 1</b>	1	Kegiatan yang dilakukan	Melakukan pendataan dan inventarisasi peraturan perundangan terkait badan hukum perkeretaapian	Melakukan pengamatan terhadap praktek perijinan badan usaha penyelenggara perkeretaapian
	2	Luaran	Adanya syarat minimum untuk membuat badan usaha perkeretaapian	Memastikan adanya syarat minimum untuk membuat badan usaha perkeretaapian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
				Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi
<b>Tahun 2</b>	1	Kegiatan yang dilakukan	Melakukan analisis data kuantitatif dan kuantitatif untuk merumuskan persyaratan minimal, penilaian dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggara perkeretaapian	
	2	Luaran	Standar Minimal Badan Usaha Penyelenggara perkeretaapian	Publikasi Ilmiah Internasional Buku Ajar

## BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

### 5.1 Anggaran Biaya

Rincian anggaran biaya yang diajukan selama 2 tahun dengan komponen seperti Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Format Ringkasan Anggaran Biaya**

No	Jenis Pengeluaran	Tahun	
		Tahun 1	Tahun 2
	<b>Biaya Dasar Penelitian</b>		
1	Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, (maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan)	44.640.000	44.640.000
2	Pembelian bahan habis pakai untuk pembelian ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan, pulsa, internet	30.780.000	16.670.000
3	Pengumpulan Data dan Bahan	41.760.000	84.000.000
4	Analisis dan pengujian	4.500.000	4.500.000
	<b>Biaya Tambahan Penelitian</b>		
1	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	3.000.000	
2	Publikasi Internasional Tidak Terakreditasi		50.000.000
3	Buku Ajar		30.000.000
	<b>Total anggaran per tahun</b>	124.680.000	149.810.000
	<b>Total anggaran seluruhnya</b>		274.490.000

## 5.2 Jadwal Peneliti

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk diagram palang (*bar chart*) sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan selama 2 tahun disampaikan dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Jadwal Kegiatan**

No	Jenis Kegiatan	Tahun ke-1												Tahun ke-2											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Penelitian	■																							
2	Penelusuran hukum dan literatur		■	■	■																				
3	Pengamatan			■	■	■	■																		
4	Pendokumentasian data				■	■	■	■																	
5	Penyusunan data							■	■																
6	Analisis data							■	■	■															
7	Laporan Penelitian tahun 1										■														
8	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi										■	■													
9	Penelusuran hukum													■	■										
10	Pengujian efektivitas hukum															■	■								
11	Analisis data kuantitatif dan kuantitatif																■	■							
12	Perumusan persyaratan minimal, penilaian dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggara perkeretaapian																	■							
13	Penyusunan SOP																			■					
14	Persiapan membuat laporan akhir																				■				
15	Evaluasi penelitian																					■			
16	Laporan Akhir																						■	■	
17	Publikasi Seminar Internasional																						■	■	
18	Penyusunan Buku Ajar																						■	■	■

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyhandie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiono Herlien, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, Dr. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Prakti Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, 2012, Mandar Maju, Bandung.
- Purwadi Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- R.Setiawan, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta.
- Soedjono Dirjosisworo, 2003, *Kontrak Bisnis*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya
- Subekti, 1986, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung.Alumni.
- \_\_\_\_\_,1987, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_,1992, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk  
Perkeretaapian Nasional;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  
dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;

Permenhub Nomor 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Bidang  
Usaha di Bidang Transportasi

**Jurnal :**

Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,  
volume 22 No. 2, Edisi Desember, Tahun 2015.

## Lampiran 1.

### Biodata Ketua Pengusul

Nama : Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.  
 NIDN : 0523106801  
 Nomor Sertifikasi : 11105100706516  
 NIP/NIK : 153 015  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 23 Oktober 1968  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Golongan/Pangkat : IV/a Pembina  
 Jabatan Akademik : Lektor Kepala  
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 Alamat : Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul  
 Yogyakarta 55188  
 Telp/Fax : 0274-387656 ext. 126 / 0274-387646  
 Alamat Rumah : Janganan Rt.05/127B Glugo Panggungharjo Sewon  
 Bantul 55183  
 Telp/No HP : (0274) 4399276, 081392415868  
 Alamat e-mail : [lelijokosuryono@yahoo.com](mailto:lelijokosuryono@yahoo.com)

### PENDIDIKAN

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro  
 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro  
 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

### PENGALAMAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN

2012 - sekarang : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 2006 – 2007 : Kepala Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum  
 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 2004 – sekarang : Anggota Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI)  
 dengan nomor keanggotaan 95.10981  
 2006 – 2007 : PIC HIBAH A2 Fakultas Hukum Universitas  
 Muhammadiyah Yogyakarta  
 2001 – 2003 : Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan  
 Laboratorium Hukum UMY  
 1994 – 1998 : Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UMY  
 1993 – 1994 : Sekretaris Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UMY

### HASIL PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

2016 : Pola Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Kredit Macet Dalam Perjanjian  
 Pinjam Meminjam Uang Tanpa Jaminan Yang Memenuhi Asas Keadilan  
 dan Asas Kepatutan Pada Koperasi Simpan Pinjam Di DIY , Hibah

Bersaing Kemenristek Dikti.

- 2012 : Aplikasi Asas Keadilan Pada Kontrak Ketenagakerjaan dan Kontrak *Outsourcing* di Indonesia (Sumber dana LP3M UMY)
- 2011 : Asas Keadilan Pada Kontrak Kerja Dalam Hubungan Industrial, diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro ISBN: 978-979.097-122-6
- 2011 : Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Sektorial dengan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Sumber Dana Kementerian Dalam Negeri)
- 2011 : Asas Keadilan Pada Kontrak *Outsourcing* Dalam Hubungan Industrial di Indonesia ( Disertasi)
- 2011 : Kedudukan dan Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Kerja di Indonesia, Jurnal Media Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol. 18, No. 1, Juni 2011, Akreditasi No. 43/Dikti/Kep/2008.
- 2009 : Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian, Jurnal Media Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.16, No. 2, Desember 2009, Akreditasi No. 43/Dikti/Kep/2008.
- 2007 : Moralitas dan Etika dalam Kontrak *Outsourcing*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Vol. XVII, Edisi Khusus, Tahun 2007. Akreditasi: No. 26/DIKTI/Kep/2005.
- 2007 : *Outsourcing* sebagai Strategi dari *Labour Market Flexibility*, Jurnal Media Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol. 14 No. 2 Desember 2007. Akreditasi: No. 26/DIKTI/Kep/2005.
- 2007 : Peran Pemerintah Dalam Pengaturan Ketenagakerjaan Indonesia di Era Global, Jurnal Media Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol. 14 No. 3 November 2007. Akreditasi: No. 26/DIKTI/Kep/2005
- 2005 : Pelaksanaan Restrukturisasi BUMN di Indonesia (sumber dana: Kopertis Wilayah V)
- 2004 : Implementasi Pemberlakuan Aturan Hukum di Bidang Kepegawaian Sebagai Upaya Untuk Menyongsong Era *Good Governance* di Pemda Kota Yogyakarta, sumber dana: LP3 UMY
- 2003 : Implementasi Hak Desain Industri Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Masyarakat Pengrajin di DIY, sumber dana: DIKTI Dosen Muda

## **KEGIATAN PROFESIONAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 2015 : Narasumber Pada Pelatihan Regulasi wajib Bagi Pabrik Pengolahan Gas, untuk staf PT Badak .
- 2015 : Narasumber pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Melalui ARBITRASE untuk Staf Legal Komisi Penyiaran Propinsi Jawa Barat
- 2015 : Narasumber pada Pelatihan Pengadaan Barang Untuk Pemerintah, Untuk staf PT Summit Niaga.
- 2015 : Narasumber pada pelatihan hukum kontrak dalam Bisnis untuk staf PT Indonesia Power
- 2015 ; Narasumber pada pelatihan Eksekusi Jaminan Kredit untuk staf Bank Aceh
- 2015 : Narasumber pada pelatihan HaK Tanggungan Permasalahan Solusi dan eksekusinya untuk Staf Bank Jabar
- 2015 ; Narasumber pada pelatihan kontrak outsourcing untuk staf Pt Biofarma
- 2015 : Narasumber pada pelatihan Hukum Ketenagakerjaan untuk Staf Pt Newmont
- 2015 : Narasumber pada Pelatihan Hukum Pasar Modal untuk staf Bank Jabar
- 2015 : Narasumber pada pelatihan Kontrak Wali Amanat dalam rangka Right issue Pasar Modal untuk Staf BRI
- 2015 : Narasumber pada pelatihan startegi berperkara di PTUN untuk Biro Hukum Pemda Bangkalan
- 2015 : Narasumber pada pelatihan Pengadaan Barang Jasa di PT Angkasapura I
- 2015 : Narasumber pada pelatihan Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah untuk Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Credit Union di Pontianak Kalimantan Barat.
- 2015 : Narasumber pada pelatihan Crontract Manajement, Contract Drafting and Legal Aspek, untuk karyawan PT Karya Tangan Indah, di Denpasar Bali.
- 2015 : Narasumber pada pelatihan Corntract Drafting and Contract Manajemen di bidang Oil and Gas di Lombok untuk Staf Pertamina .PT Badak dan PT Petro Cina

- 2015 : Narasumber pada pelatihan aspek hukum dibidang Kontrak outsourcing untuk staf PT Badak di Yogyakarta.
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Aspek Hukum Pembebasan Tanah dan Penggunaan Tanah untuk Pembangunan untuk Staf PT Persero Pelindo II di Yogyakarta
- 2014 : Narasumber pada pelatihan hukum Penggunaan Tanah bagi Pembangunan untuk Staf Chevron Indonesia, Rumbai Pekan Baru.
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Aspek Hukum BUMD untuk Dinas Perekonomian Kabupaten Poso Sulawesi Tengah di Yogyakarta
- 2014 : Narasumber pada Pelatihan Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi untuk dinas kominfo Kabupaten Kupang NTT
- 2014 : Konsultan ahli pada penyusunan Raperda Rencana Induk Pengelolaan Air Minum di Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau
- 2014 : Narasumber pada pelatihan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi untuk kepala dinas SKPD kabupaten Bovendigul Papua di Yogyakarta
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Medical Law untuk staf legal Rumah Sakit di Yogyakarta
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Eksekusi Kredit dengan Jaminan Maupun Tanpa Jaminan untuk Staf AO BRI Kanwil Bali NTB dan NTT di Yogyakarta
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Busines Legal Contract Darfting staf legal Bank Jabar (BJB) di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek di Hotel Royal Krakatau Steel Cilegon Banten.
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Focus Discusion Group (FGD) evaluasi perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dengan Yayasan Tridaya Dalam Penyelesaian Asset Eks Perkara Lee Darmawan, di Bank Indonesia Jakarta
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi untuk staf legal Bank Jabar (BJB) di Yogyakarta
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Penanganan kredit macet untuk staf legal BPR Bantul, BPR Kota Yogya, BPR Sleman dan BPR Gunung Kidul di Yogyakarta

- 2014 : Narasumber pada pelatihan Aspek Hukum Kepailitan untuk staf legal Bank BRI di Yogyakarta
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi untuk staf legal Bank Jabar di Yogyakarta
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi untuk staf legal Bank BRI di Kute Bali
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi untuk staf legal BRI Syariah di Jakarta.
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi untuk staf legal Bank Jabar di Kute Bali
- 2014 : Narasumber pada pelatihan Business Legal Contract Drafting untuk staf PT ASDP di Jakarta
- 2013 : Narasumber pada pelatihan Teknik dan Strategi penyusunan Legal audit dan Legal Opini untuk staf legal Bank Sumsel dan Bank Jatim
- 2013 : Narasumber pada pelatihan Hukum Perbankan untuk staf legal BRI Unit Papua di Hotel Ibis Yogyakarta
- 2013 : Narasumber pada pelatihan Aspek Hukum Kepailitan dan PKPU untuk karyawan BRI di Hotel Ibis Kute Bali
- 2013 : Narasumber Pada Acara In House Training Hubungan Industrial dan Outsourcing, untuk karyawan PT Holcim Cilacap.
- 2013 : Nara sumber Pelatihan Aspek Hukum Eksekusi Hak Tanggungan dan Hak Fiducia, Untuk Staf Legal pada Bang Rakyat Indonesia dan Bang Kepri, di Hotel Ibis Style Yogyakarta.
- 2013 : Narasumber Pelatihan Penyelesaian sengketa secara Litigasi dan Non Litigasi untuk Pimpinan dan Staf Legal PT Persero PELINDO II di hotel Ibis Style Yogyakarta.
- 2013 : Narasumber pada In House Training, Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Basyarnas di Bank BPD DIY Syariah.
- 2013 : Narasumber pada Teknik dan Strategi Negosiasi dan Mediasi konflik struktural dalam sengketa pertanahan, untuk Staf Humas PT Cevron Indonesia, di Hotel Ibis Semarang.
- 2013 : Narasumber Workshop, Aspek Hukum Hibah Barang Milik Negara Ke Pemerintah Daerah untuk para anggota DPRD Kabupaten Batang. LPM UIN Walisongo Semarang.

- 2013 : Narasumber Pelatihan Stategi Penyelesaian sengketa secara Non Litigasi untuk Pimpinan dan Staf Legal PT Persero Bank BNI 46 Jakarta di hotel Ibis Style Yogyakarta
- 2013 : Narasumber Pelatihan Legal Audit dan Legal Opinion untuk Staf legal PT ASDP Persero di hotel New Shapir Yogyakarta
- 2013 : Konsultan Ahli dalam Penyusunan Naskah Akademik Perda di bidang Perizinan dan perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Boyolali Jateng.
- 2013 : Narasumber Pelatihan Litigasi dan non litigasi untuk staf dan Pimpinan Bank Jateng di Hotel Ibis Style Yogyakarta
- 2013 : Konsultan Ahli dalam Penyusunan Data Perizinan Perusahaan PMA & PMDN di BKPM Di DIY.
- 2013 : Narasumber pelatihan Penagihan & Penyelesaian Kredit Bermasalah Ditinjau dari Aspek Hukum untuk staf BRI di Hotel Phoenix Yogyakarta
- 2013 : Narasumber Pelatihan Aspek Hukum Kepailitan untuk Staf LPPM BRI di Hotel Ibis Kute Bali
- 2013 : Narasumber Pelatihan Legal Drafting and Writing Skill untuk Pimpinan BPOM Surabaya di Hotel Ibis Yogyakarta.
- 2013 : Narasumber Workshop penyusunan Contract Drafting dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk staf legal Kementerian Perdagangan RI di Hotel Arjuna Yogyakarta.
- 2013 : Narasumber Workshop penyusunan Contract Drafting untuk Staf legal Kementerian Perdagangan RI di Hotel Ibis Style Yogyakarta
- 2013 : Narasumber Worskshop Legal Audit dan Legal Opini bidang hukum Pertanahan untuk staf legal Radio Republik Indonesia, Di Hotel Ibis Stayle Yogyakarta.
- 2013 : Narasumber Workshop Legal Audit dan Legal Opini untuk staf biro hukum PT Perdagangan Indonesia, di Hotel Ibis Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber Workshop BUMD tentang Analisis Kinerja dan Strategi Pengembangan BUMD untuk Menggerakkan Ekonomi Lokal dan Meningkatkan PAD, di Hotel Grand Palace Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber Pelatihan Contract Strategi dan Management untuk Divisi Kontrak PT Conoco Indonesia di Hotel Aston Yogyakarta.

- 2012 : Narasumber Pelatihan Contract Strategi dan Management Staf Diklat BRI di Hotel Aston Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber Workshop tentang Hubungan Industrial sesuai dengan Permenaker No. 13 tahun 2012 untuk staf legal PT Gas Indonesia di Hotel Grage Ramayana Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber Pelatihan Contract Strategi dan Management PLC Pertamina, di Hotel Patrajasa Semarang
- 2012 : Narasumber pada training Hukum Kepailitan untuk Bank Riau di Hotel Ibis Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber pada training PKWT, PKWTT dan Outsourcing di Hotel Ibis Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber Pelatihan tentang penyelesaian sengketa secara litigasi untuk staf legal PT Pos Indonesia di Hotel Aston Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber pada In House training tentang Parate Eksekusi Hak Tanggungan di BPD DIY
- 2012 : Narasumber pada In House training tentang Contract Drafting dan Contract Manajemen di BPD DIY
- 2012 : Narasumber pada In House training tentang Strategi Negoisasi dan Eksekusi Jaminan Kredit di BPD DIY
- 2012 : Narasumber Pada Workshop Pelatihan Pembuatan Legal Audit dan Legal Opinion untuk Staf Legal Kementrian Perdagangan Republik Indonesia di Hotel jambu Luwuk Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber Pada Workshop Pelatihan Pembuatan Legal Audit dan Legal Opinion Untuk Staf Legal di Kementrian Perekonomian Indonesia di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber Pada In House Pembuatan Legal Audit dan Legal Drafter di BPD Jatim.
- 2012 : Narasumber Pada In House Pembuatan Legal Audit dan Legal Opinion untuk Staf Legal PT Transportasi Gas Indonesia Jakarta.
- 2012 : Narasumber Pada In House Pembuatan Legal Audit dan Legal Opinion untuk Staf Legal Bank BRI Pusat Jakarta
- 2012 : Narasumber Pada Workshop Pembuatan Legal Audit dan Legal Opinion untuk Staf Legal Bank BRI Makasar, di Hotel Jayakarta Yogyakarta

- 2012 : Narasumber Pada Workshop Pembuatan Legal Audit dan Legal Opinion Pada Bank BRI Semarang di Hotel Jayakarta Yogyakarta
- 2012 : Narasumber Pada Worksshop Pembuatan Legal Audit dan Legal Opinion Pada Bank Aceh di Hotel Jayakarta Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber Pada Workshop Hukum Perusahaan, di Hotel Shapir Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber Pada Workshop Penyelesaian Sengketa secara Litigasi dan Non Litigasi di Hotel Sheraton Lombok.
- 2012 : Narasumber Pada In House Training Penyelesaian Sengketa secara Litigasi di Bank Kaltim
- 2012 : Narasumber Pada In House Training Eksekusi Jaminan Kredit di BPD DIY.
- 2012 : Narasumber Workshop Hukum Agraria dan Problematikanya di Indonesia, (Untuk Staf Legal PT Chevron Indonesia) di Hotel Ibis Jakarta
- 2012 : Narasumber Workshop Hukum Agraria dan Problematikanya di Indonesia, (Untuk Staf Legal PT Krakatau Stel Cilegon) di Hotel Ibis Jakarta
- 2012 : Narasumber Pada Workshop Penyusunan Perda Tower Bersama untuk Menunjang Keamanan dan Estetika Lingkungan Serta Meningkatkan PAD, di Hotel Mutiara Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber Pada Workshop *Outsourcing* dan PKWT di Hotel Shapir Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber Pada Workshop Masa Depan *Outsourcing* sebagai Strategi Bisnis Pasca Putusan MK, di Hotel Shapir Yogyakarta.
- 2012 : Narasumber Pada Workshop Sehari *Outsourcing* dan Kontrak Kerja, di Hotel Oasis Amir, Jakarta.
- 2012 : Narasumber Dalam Seminar “Memantapkan *Outsourcing* sebagai Strategi Usaha Pasca Keputusan MK” di Hotel Le Dian Serang Banten.
- 2011 : Penyusunan Draf Rancangan Pergub DIY tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2011 : Narasumber Workshop Metode Efektif Penagihan Hutang Antar Perusahaan (cara efektif melakukan proses penagihan hutang antar perusahaan yang berkekuatan hukum untuk mengamankan asset perusahaan)
- 2011 : Narasumber Workshop Manajemen *Outsourcing*, Strategi, Aspek Hukum dan Implementasinya
- 2011 : Narasumber Workshop Aspek Hukum Agraria bagi Kepentingan

Perusahaan.

- 2011 : Narasumber Workshop Aspek Hukum Konversi Hak-Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Pertambangan.
- 2011 : Narasumber Workshop Manajemen Kontrak dan *Contract Drafting*
- 2011 : Narasumber Workshop Aspek Hukum Di Bidang Investasi
- 2011 : Narasumber Workshop Aspek Hukum di Bidang Kegiatan Korporasi
- 2011 : Narasumber Workshop Aspek Hukum Perkreditan dan *Appraisal Contract*
- 2011 : Narasumber Workshop Aspek Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- 2011 : Narasumber Workshop Restrukturisasi BUMD (Aspek Hukum Restrukturisasi BUMD dan Kerangka Regulasi Pengelolaan BUMD menuju GCG)
- 2011 : Narasumber Workshop Hukum Perjanjian Untuk Kalangan Perbankan
- 2011 : Narasumber Workshop Manajemen *Outsourcing* (Teknik dan Strategi Mengelola Tenaga *Outsourcing*)
- 2010 : Narasumber Workshop Analisa Perkreditan dan Dasar Hukumnya
- 2010 : Narasumber Workshop Investasi Daerah, Strategi Investasi Daerah dan Kerjasama Pemda dengan Pihak Lain, Perspektif Ekonomi dan Hukum
- 2010 : Narasumber Workshop Investasi Daerah (Dasar-dasar Penyusunan Perda tentang Investasi dan Kontrak Kerjasama serta Penyelesaian Sengketa di bidang Investasi)
- 2010 : Narasumber Workshop Bidang Hukum Perbankan (Mengkaji berbagai peraturan perbankan di Indonesia)
- 2010 : Narasumber Workshop Strategi *Outsourcing* dalam menumbuhkan kemitraan antara perusahaan penyedia dan perusahaan pengguna serta tenaga kerja
- 2010 : Narasumber Workshop *Outsourcing* Sebagai Strategi Manajemen Organisasi
- 2010 : Narasumber Workshop Restrukturisasi BUMD (Aspek Hukum Restrukturisasi BUMD dan Kerangka Regulasi Pengelolaan BUMD menuju GCG)
- 2010 : Narasumber Manajemen Penggajian Tenaga *Outsourcing* (Teknik Dan

Strategi Penyusunan Sistem Penggajian Pada Tenaga *Oursourcing* Yang Memacu Produktivitas Dan Menguntungkan Semua Pihak)

- 2010 : Narasumber Workshop *Legal Drafting for Decision Making*
- 2010 : Narasumber Workshop Teknik Penyusunan Dokumen Dan Kontrak *Oursourcing* Yang Menguntungkan Semua Pihak dan Memberi Rasa Aman Perusahaan
- 2010 : Penyuluhan Hukum di Radio tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Internasional
- 2010 : Narasumber Bimbingan Teknis: Teknik Pembuatan Kontrak dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

#### KONFERENSI, SEMINAR, LOKAKARYA

- 2011 : Peserta pada "*International Seminar Theme: Recent Issues In Comparative Law*", *Cooperation among Faculty of Law Diponegoro University, Faculty of Law Flinders University, Australia and Faculty of Law San Carlos University, Philipina.*
- 2010 : Peserta pada "Seminar Nasional: Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga (*Oursourcing*) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)", diselenggarakan oleh Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Pusat Pembinaan Sumberdaya Manusia
- 2010 : Pembicara pada Lokakarya Nasional Analisis Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Sistem Akuntansi Pemda, diselenggarakan oleh Pusat Studi Otonomi Daerah Yogyakarta
- 2010 : Pembicara pada Lokakarya Nasional Teknik Kerjasama Luar Negeri dan Investasi Asing Di Daerah, diselenggarakan oleh Pusat Studi Otonomi Daerah Yogyakarta

Yogyakarta, 04 Juli 2017

Yang Menyatakan,



Dr. Leli Joko S, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0523106801

**Biodata Anggota****IDENTITAS DIRI**

Nama : Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.  
 NIDN : 0515047501  
 NIP/NIK : 153 043/  
 NPWP : 89.125.369.2-541.000  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 15 April 1974  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status Perkawinan : Kawin  
 Agama : Islam  
 Golongan/Pangkat : III b/ Penata Muda Tingkat I  
 Jabatan Akademik : Lektor  
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 Alamat : Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan,  
 Bantul, Yogyakarta, 55183.  
 Telp./Faks. : (0274) 387 656/ (0274) 387 646  
 Alamat Rumah : Purwodiningratan NG I/755 Yogyakarta  
 Telp./Faks./HP. : -/-/ 0815 796 9113  
 Alamat e-mail : [nanikprasetyoningsih@yahoo.com](mailto:nanikprasetyoningsih@yahoo.com).

**RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI**

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
2012	Doktoral (S3)	Universitas Diponegoro	Ilmu Hukum
2007	Magister (S2)	Universitas Padjadjaran	Ilmu Hukum/ Ketatanegaraan
1997	Sarjana (S1)	Universitas Islam Indonesia	Ilmu Hukum / Hukum Bisnis

**PENGALAMAN PENELITIAN**

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota Tim	Sumber Dana
2012	Studi Kebijakan Pengaturan Distribusi Kewenangan Otonomi Daerah Menurut UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2004 Ke Dalam Peraturan Daerah	Anggota	Dana Penelitian UMY TA 2011-2012
2010	Studi Implementasi Nilai-Nilai HAM Dalam Peraturan Daerah Dan Dampaknya Bagi Pemenuhan Hak Ekosob Di Kabupaten Bantul Provinsi DIY	Ketua	Dana Penelitian Strategis DP2M Dikti TA 2009-2010
2009	Konsep Hukum Posisi Aliran Sesat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Beragama di Indonesia.	Anggota	Dana Penelitian Fundamental DP2M Dikti TA 2008-2009
2009	Kedudukan Otonomi Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah Pasca Amandemen UUD1945.	Ketua	Dana Penelitian Dosen Muda DP2M Dikti TA. 2008-2009

2008	Pemberlakuan Syari'at Islam Dalam Peraturan Daerah Di Indonesia, Pengaturan, Pembinaan Dan Penciptaan Harmonisasi Dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Kasus Di 4 Daerah).	Anggota	Dana Penelitian Hibah Bersaing DP2M Dikti TA. 2007-2008
2007	Pemberlakuan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.	Anggota	Dana Penelitian Kompetisi Penelitian Dosen UMY 2007
2007	Kajian Yuridis Atas Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Yogyakarta.	Ketua	Dana Penelitian Dosen Muda DP2M DIKTI TA. 2006-2007
2007	Makna Kemandirian Dan Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat.	Ketua	Dana Penelitian Hibah Penelitian Program Hibah Kompetisi (PHK) A-2 Bacth III FH UMY 2007
2006	Aspek Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Ketua	Dana Penelitian Dosen Muda DP2M DIKTI TA. 2005-2006
2005	Kajian Yuridis Terhadap Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.	Ketua	Dana Penelitian KOPERTIS Wilayah V TA. 2004-2005
2004	Pertanggungjawaban Lembaga-Lembaga Negara Berdasarkan UUD1945.	Ketua	Dana Penelitian Reguler UMY TA. 2003-2004
2003	Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Lembaga Musyawarah Desa Banjar Arum, Kalibawang, Kulon Progo, 1998.	Ketua	Dana Penelitian KOPERTIS Wilayah V TA. 2002-2003

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam **Curriculum Vitae** ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, 05 Juli 2017

Yang Menyatakan,



Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.  
NIDN. 0515047501

## Biodata Anggota Pengusul

### IDENTITAS DIRI

Nama : Reni Anggriani, S.H.,M.Kn.  
 NIDN : 0501127505  
 NIP/NIK : 19751201504153060  
 NPWP : 24.217.345.5.542.000  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Banjar-Ciamis, 01 Desember 1975  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status Perkawinan : Kawin  
 Agama : Islam  
 Golongan/Pangkat : III b/ Penata Muda Tingkat I  
 Jabatan Akademik : Asisten ahli  
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 Alamat : Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan,  
 Bantul, Yogyakarta, 55183.  
 Telp./Faks. : (0274) 387 656/ (0274) 387 646  
 Alamat Rumah : Perum UNY / IKIP, Jl. Deresan I/8, RT/RW: 14/05,  
 Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta.  
 Telp./Faks./HP. : -/-/ 081328671269  
 Alamat e-mail : anggriani75@yahoo.co.id

### RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
2006	Magister (S2)	Universitas Gadjah Mada	Kenotariatan
1998	Sarjana (S1)	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Ilmu Hukum

### PENGALAMAN KERJA

Tahun	Nama Kegiatan	Instansi/Jabatan	Sumber dana
2016	Kajian Pola Kelembagaan Dan Pembiayaan <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Sumatera Selatan	Keasdepan Transportasi Koordinator Bidang Perekonomian/Tenaga Ahli Hukum/Kelembagaan	APBN
2015	Kajian Kawasan Industri DIY	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta/ Tenaga Ahli	APBD

		Hukum	
2015	Kajian Perencanaan Implementasi Penyediaan Akses Internet Untuk Rusunawa, Desa Nelayan Dan Pertanian	Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informasi/Tenaga Ahli Hukum	APBN
2015	Studi Standarisasi Kecukupan Persyaratan Sebuah Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Tenaga Ahli Hukum	APBN
2015	<i>Implementation Framework For The High Speed Rail Jakarta – Bandung</i>	Tenaga Ahli Hukum	Swasta
2015	<i>Broadband Indonesia</i>	Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia/Tenaga Ahli Hukum	APBN
2014	Kegiatan BBM Bersubsidi	ICED/Tenaga Ahli Hukum	ICED
2013	Kegiatan Penyusunan <i>Masterplan</i> Transportasi Nasional	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia/Tenaga Ahli Hukum	APBN
2013	Kajian Evaluasi Trans Jogja	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Daerah Istimewa Yogyakarta/Tenaga Ahli Hukum	APBD
2012	Kegiatan Penyusunan <i>Standar Operational Procedure (SOP)</i> dan Tata Kerja Otorita Transportasi Jabodetabek	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia/Tenaga Ahli Hukum	APBN
2012	Proyek Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Jembatan Selat	Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada/Tenaga Ahli Hukum	Swasta

	Sunda		
2010	Proyek Kajian Jalur Pipa Gas, Tata Ruang dan Wilayah, Sosial-Ekonomi dan Budaya Untuk Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Gresik-Semarang	Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada/ Tenaga Ahli Hukum Perijinan	Pertagas
2010	<i>Legal Opinion</i> terhadap Pilihan Legalitas terhadap Perubahan Status Universitas Pembangunan Nasional Veteran	Universitas Pembangunan Nasional Veteran /Tenaga Ahli Hukum	UPNV/ APBN
2008 s/d 2010	Proyek <i>Development of bidding document for Fleet Provision and Bus operation selection of Trans Jakarta Busway Corridor IX and X</i> , Provinsi DKI Jakarta	ITDP - Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada/Tenaga Ahli Hukum	ITDP

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, 04 Juli 2017

Yang Menyatakan,



Reni Anggriani, S.H.,M.Kn.



### SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. LeliJoko Suryono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0523106801  
Pangkat / Golongan : Pembina/IV a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul: "Standarisasi Bentuk Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum" untuk tahun anggaran 2017 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.



Dr. Ir Gatot Supangkat, M.P.  
NIP.196210231991031003

Yang menyatakan,



Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.  
NIDN 0523106801